

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990
- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Bagir manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 2008. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Raya Abadi, Bandung, 1996.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Ofyar Z. Tamin, *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Penerbit ITB, Bandung, 1997.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999. Sumitro Maskun, *Hukum tata pemerintahan: Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Widodo Groho Triatmojo, dalam buku *Memahami Sumbu Terberat dan Kelas Jalan*, Semarang, 2016

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Umum

Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Dan Tarif Angkutan Bus Kota

**Sumber Lainnya :**

- Annisa Sherin Millenia, Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81>
- Annisa Sherin Millenia, Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81>
- <https://dishub.jabarprov.go.id/web/>
- Irianto, Y. (2020). KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERATURAN,. *Jurnal Ilmiah Indonesia* , 5(2).
- Kamal. (2015). DAMPAK KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMAMMADIYAH MAKASSAR.
- Purnama Putra Kejaksaan Negeri Tanah Laut, D. (n.d.). DISKRESI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI.
- Teras Narang, A., Hadi, K., Telaumbanua -Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses, R., & Telaumbanua, R. (2021). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses Legislasi Pemekaran Daerah di

Indonesia. Oktober, 2(2), 70–135.  
<http://jurnal.unkrip.ac.id/index.php/Nyuli>

Tri Jata Ayu Pramesti. (2022, March 1).  
<https://www.hukumonline.com/klirik/a/kewenangan-diskresi-pejabat-pemerintahan-dan-sejumlah-aturannya-lt54b538f5f35f5>. Hukum Online  
wijaya. (2020). KEWENANGAN DISKRESI MENGENAI PELUANG  
SIKAP TINDAK. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(02).

<https://opendata.jabarprov.go.id/id/artikel/harga-bbm-meroket-apakah-inflasi-jawa-barat-ikut-terkerek>